

*Etika Keutamaan
dalam Arah Pendidikan Indonesia Kontemporer*

Johanis Ohoitumur

ABSTRAK: Etika keutamaan, seperti yang menjadi pendirian Aristoteles, menekankan pengembangan diri. Manusia yang benar dan baik diukur menurut keutamaan yang dimiliki. Ada banyak keutamaan, tetapi yang terpenting ialah kebijaksanaan dalam arti *phronēsis*. Orang yang memiliki *phronēsis* bertindak menurut pertimbangan yang bijaksana dan berorientasi pada apa yang benar dan baik bagi manusia. Artikel ini berusaha melakukan eksplisitasi bahwa arah pendidikan nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menekankan dan fokus pada etika keutamaan, yaitu pembentukan karakter atau watak peserta didik. Pengetahuan (kognitif) dan keterampilan praktis (psikomotorik) mendapatkan coraknya dari karakter. Sama halnya dengan kebijaksanaan praktis (*phronēsis*) dalam ajaran Aristoteles, karakter hanya bisa dibentuk melalui pembiasaan bertindak atau berperilaku. Dalam konteks ini pendidikan nilai dan pendidikan moral menemukan jalannya.

KATA KUNCI: Etika keutamaan, pengembangan diri, *phronesis*, pendidikan, karakter.

ABSTRACT: *Virtue ethics as developed by Aristotle focuses on self development in a sense that right or wrong will be measured by the virtue which is needed for the excellence of the human person. There are many virtues, but the most fundamental is phronesis. Every body who has phronesis will act according to rational judgement. It is based on what is good and what is right for the development of human beings. This article tries to explicate the thesis that the national system of education in elementary school and high school which focuses on the character building is in line with virtue ethics. In this affinity, knowledge and practical skill get their meaning in the frame of character building. As Aristotle convinced that both phronesis and character can be formed through habituation, it suggests that habituation is the only way to enhance the moral and value education.*

KEY WORLD: *Character, education, phronesis, self development, virtue*

1. PENDAHULUAN

Kenneth A. Strike dan Jonas F. Soltis dalam *The Ethics of Teaching* (1985) menunjuk berbagai masalah dan dilema etis yang dapat muncul dalam proses belajar-mengajar.¹ Pendekatan buku ini bersifat kasuistik, yaitu dari suatu kasus konkret di ruang kelas atau laboratorium, masalah dan dilema moral dirumuskan. Masalah moral dapat muncul dalam kaitan dengan kepribadian dan perilaku guru, selain dari interaksi guru-murid dan hak-hak peserta didik dan orang tuanya. Sebagai contoh: dalam suatu kelas praktik kimia di laboratorium, seorang siswa meledakkan tabung dengan sengaja. Pelakunya diketahui oleh seluruh kelas, tetapi mereka merahasiakannya kepada guru. Seorang siswa secara anonim menginformasikan nama si pelaku kepada guru, namun siswa yang dilaporkan menyangkal perbuatan yang dituduhkan. Pada mulanya seluruh kelas dihukum, tapi kemudian hanya siswa yang dilaporkan. Ia diskors dan dianggap gagal, walaupun ia mati-matian menyangkal. Pertanyaannya, apakah patut siswa ini dihukum sebagai jalan penjeraan bagi semua siswa lain? Contoh kasus yang lain lagi: Seorang guru sejarah terbilang alkoholik, mengajar tanpa administrasi pengajaran yang standar, tapi mampu menciptakan kondisi belajar yang penuh gairah dan kreatif bagi murid-muridnya. Murid-murid selalu bisa mencapai nilai ujian yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana menilai peranan guru yang sedemikian itu? Apakah ia boleh disebut guru yang baik secara moral?

Artikel ini tidak secara langsung berkaitan dengan etika mengajar (*ethics of teaching*) di mana persoalan etis terutama dihubungkan dengan profesionalitas dan kepribadian guru, hak dan kewajiban peserta didik dan orang tua. Pembahasan di sini difokuskan pada arah pendidikan nasional seperti yang

terbaca pada kurikulum 2013 bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendidikan karakter. Jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kurikulum terbaru ini secara eksplisit memberi tekanan dan fokus pada pembentukan karakter sebagai sasarannya. Bagaimana perubahan ini dilihat dari perspektif filsafat moral?

2. ARAH PENDIDIKAN DALAM DINAMIKA PERUBAHAN KURIKULUM

Persoalan hakiki pendidikan sebetulnya terletak pada konsep manusia. Pertanyaannya, “Apa gambaran manusia yang mesti diproses dan direalisasi melalui pendidikan?” Pertanyaan ini menyangkut konsep manusia yang dicita-citakan dan diperjuangkan melalui kurikulum serta proses belajar-mengajar. Jadi, masalah terletak pada konsep manusia sebagai tujuan pendidikan.

Tentu menarik untuk dilacak dalam sejarah pendidikan di Indonesia, bagaimana di zaman dulu pemerintah kolonial Belanda membedakan sekolah bagi anak-anak pribumi dan sekolah khusus untuk anak-anak Eropa dan kalangan bangsawan. Apapun dasarnya, diskriminasi inheren dalam konsep dan praktik itu. Nuansa yang berbeda tampak pada sekolah-sekolah yang dibuka oleh para misionaris Katolik pada era yang sama di Muntilan, Larantuka, Langgur dan Tomohon. Di sana berlaku prinsip: satu sekolah untuk siapapun, tanpa membedakan latar belakang budaya, sosial, ekonomi dan agama. Dalam kenyataannya, sekolah-sekolah yang dirintis oleh para misionaris itu lebih menjadi pusat peradaban yang baru (*new civilization*) daripada sekedar sebagai instrumen penyebaran agama (*evangelization*). Di sekolah-sekolah itu budaya baru diperkenalkan, dan dikembangkan dengan muatan nilai-nilai yang hakiki

seperti menghargai diri dan sesama, disiplin dan tanggung jawab, kejujuran dan kerja keras.

Bagaimana dengan era Indonesia merdeka? Arah pendidikan nasional sudah ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Secara operasional pemerintah terus menerus melakukan perubahan dan pembaharuan kurikulum, terutama pendidikan dasar dan menengah, untuk mewujudkan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia tersebut. Baiklah disimak di sini dinamika perubahan arah pendidikan seperti tampak pada kurikulum-kurikulum yang silih berganti dalam era pemerintahan Orde Baru sampai sekarang.

Pada tahun 1968 kurikulum baru diterbitkan sebagai pengganti kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dinamakan Rencana Pendidikan dan menitik-beratkan pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, serta pendidikan jasmani dan kesehatan (karena itu dikenal sebagai kurikulum *pancawardhana*). Sekolah diwajibkan untuk membimbing murid agar mampu memikirkan dan memecahkan masalah (*problem solving approach*). Pemerintah Orde Baru menggantikan kurikulum tersebut dengan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Cita-citanya, membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat secara jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, beragama dan bermoral serta berbudi pekerti luhur. Manusia Indonesia harus menjadi manusia Pancasila, bukan manusia sosialis seperti yang dianggap sebagai cita-cita kurikulum 1964.

Tahun 1975 pemerintah menerbitkan kurikulum yang baru dengan pola *management by objective*. Bahan ajar, metode dan tujuan pengajaran dirinci menurut skema proses pengembangan sistem instruksional. Setiap satuan pela-

ajaran diuraikan menurut tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Guru di kelas harus berusaha dan memastikan bahwa tujuan-tujuan instruksional khusus tercapai. Kurikulum ini berorientasi “tujuan”. Kemudian kurikulum 1984 menyempurnakan kurikulum 1975 dengan menggunakan *process skill approach*. Pendekatan ini menekankan partisipasi siswa secara kreatif dalam proses belajar-mengajar, dan karena itu proses pengajarannya populer dengan sebutan “cara belajar siswa aktif”. Siswa dipandang sebagai subyek yang dikondisikan untuk aktif terlibat secara fisik dan mental, intelektual dan emosional. Atas cara itu diharapkan bahwa siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik secara kognitif maupun afektif dan psikomotorik. Jelas bahwa kurikulum 1984 berorientasi pada “proses”.

Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan kembali tujuan pendidikan nasional dengan menyebut tiga butir: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mengembangkan konsep manusia Indonesia seutuhnya, dan (3) konsep manusia bermoral, religius, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, cakap, sehat dan sadar sebagai warga dan bangsa.² Dalam arah tersebut, lahirlah kurikulum tahun 1994 menggantikan kurikulum 1984. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kurikulum 1994 mengubah sistem semester menjadi caturwulan dengan tujuan agar siswa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mempelajari bahan ajar. Kurikulum ini sebenarnya ingin menggabungkan pendekatan “tujuan” (1975) dan “proses” (1984). Namun dalam kenyataannya, kurikulum 1994 memberi tekanan pada penguasaan materi pelajaran. Orientasi kurikulum ini diletakkan pada substansi pengajaran (*content oriented*), dengan konsekuensi beban belajar dianggap terlalu berat dan sulit bagi siswa. Kurikulum ini dinilai

kurang memberi perhatian pada aplikasi praktis pengetahuan. Sejalan dengan perubahan politik negara di masa reformasi (1998) dengan sistem otonomi daerah, kurikulum 1994 mengalami proses perubahan secara bertahap. Pada era ini mulai dibahas apa yang kelak menjadi kurikulum 2004 dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

KBK memberikan penekanan pada pengembangan kompetensi dalam arti “kemampuan melakukan” pekerjaan atau tugas dengan standar tertentu. Kompetensi meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap dan minat. Semua aspek itu harus dinilai perkembangannya oleh guru yang dirangkum dalam tiga kategori *assessment*: kognitif, psikomotorik, dan afektif. Atas cara ini keragaman kompetensi dengan sendirinya diakui sesuai latar belakang siswa, dan variasi metode pembelajaran dapat diterapkan. Dalam kenyataannya, KBK sungguh membingungkan. Pada level praktis, guru-guru kurang memahami apa kompetensi yang dikehendaki oleh kurikulum ini. Cara dan standar penilaian terhadap aspek-aspek kompetensi pun tidak benar-benar jelas. Pada tataran konseptual, kritik dikemukakan bahwa sesungguhnya KBK lebih tepat diartikan sebagai “kurikulum bertujuan kompetensi”, karena ingin mengembangkan kompetensi peserta didik. Kurikulum “berbasis kompetensi” mengandung ambiguitas: kompetensi siapa, guru atau murid?³ Selain itu, tersirat pula bahwa KBK berorientasi pada pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar. Jadi, coraknya “*market oriented*”. Tampak pada orientasi ini upaya untuk menjembatani sekolah dan masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia kerja. Hal ini sesuai benar dengan jiwa sistem pendidikan nasional seperti ditetapkan dalam UU no. 20 tahun 2003, yaitu pendidikan berbasis masyarakat dan sekolah.

Dalam tahun 2006 uji coba KBK dihentikan dan pemerintah meluncurkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan semangat UU no. 20/2003 dan Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dua produk hukum itu menekankan kemajemukan, demokrasi dan otonomi, dan implikasinya masing-masing sekolah diberikan ruang untuk menyusun kurikulumnya. Karena itu kurikulum pengganti KBK disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri yang paling membedakan KTSP dari semua kurikulum sebelumnya terletak pada corak desentralisasi. Semua kurikulum lain disusun dan ditawarkan dari pusat, sedangkan KTSP disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP memiliki orientasi ganda: pada hasil (*outcome*) dan pada proses. Proses belajar-mengajar bersifat komunikatif dua arah; baik guru maupun murid berperan sebagai narasumber. Sayangnya, kurikulum ini kurang disosialisasi, sehingga berdampak buruk pada pelaksanaannya. Banyak sekolah dan pendidik tidak memiliki kemampuan cukup untuk secara kreatif mengembangkan sarana-sarana pembelajaran sesuai arahan KTSP.

Setelah diwacanakan sejak tahun 2011, akhirnya pada tahun 2013 pemerintah memberlakukan kurikulum yang baru dengan sebutan kurikulum 2013. Secara substansial kurikulum ini tidak sangat berbeda dari KTSP. Hal yang paling khas ialah kurikulum 2013 menekankan pendidikan atau pembentukan karakter. Setiap sekolah mesti memiliki budaya sekolah dan kegiatan belajar-mengajar serta variasi metode dirancang sebagai proses penanaman nilai-nilai dan pengembangan karakter atau watak peserta didik. Setiap mata pelajaran wajib merujuk kepada empat kompetensi inti yang menyatakan kualitas-kualitas yang hendak dicapai. Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok

secara saling kait-mengait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Aspek pendidikan karakter ditentukan oleh dua aspek pertama kompetensi inti tersebut. Pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) harus didasarkan pada watak atau karakter yang kuat.⁴ Dalam tahun 2014 penekanan pada pendidikan karakter menjadi lebih tegas lagi melalui upaya pemerintah untuk menerapkan “revolusi mental” pada bidang pendidikan. Ini tampak pada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai indeks integritas sekolah-sekolah pada pelaksanaan ujian nasional. Indeks integritas merujuk kepada kejujuran akademik dan komitmen sekolah serta para pendidik untuk melaksanakan seluruh kegiatan belajar-mengajar dengan tertib, terencana, dan bertanggung jawab. Di sini tekanan diberikan pada proses kerja pendidikan, bukan sekedar lulus atau tamat.

Jadi, sesuai dengan konteks dan visi politik pemerintah, setiap kurikulum memberikan perhatian utama pada aspek tertentu. Visi dasar “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak pernah diabaikan. Tetapi nyata benar adanya ketegangan dalam dinamika perubahan dari kurikulum yang satu ke kurikulum yang lain: antara tujuan dan proses, antara substansi dan metode, antara pengetahuan teoritis dan keterampilan, antara kompetensi kerja dan karakter. Sejarah perkembangan kurikulum berakhir dengan arah pendidikan yang menekankan karakter sebagai wujud kualitas manusiawi dan watak moral.

3. TINJAUAN FILOSOFIS

Kompleksitas dinamika perubahan-perubahan kurikulum seperti diringkaskan di atas memperlihatkan betapa pendidikan nasional kita masih

terus dalam “proses menjadi”. Faktor yang secara dominan mewarnai perubahan-perubahan arah pendidikan ialah ideologi dan paham politik-ekonomi yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada awal pemerintahan Orde Baru ideologi Pancasila dijadikan faktor transformatif pendidikan. Nuansa humanistik-sosialis diganti dengan nilai-nilai Pancasila sebagai karakteristik pengarah. Ketika pemerintahan ini menganut developmentalisme, sangat jelas bahwa pendidikan diarahkan kepada capaian-capaian pembangunan. Hal ini tampak pada *management by objective* yang dianut kurikulum 1975 dan *process skill approach* dalam kurikulum 1984. Dua pendekatan ini saling melengkapi dan bersama-sama mengasumsikan hasil pendidikan secara langsung, efisien, terukur dan cepat kelihatan. Pendidikan dirancang menurut paham politik-ekonomi kapitalistik yang mengutamakan produksi di bidang ekonomi. Pada pertengahan masa pemerintahan presiden Soeharto sampai masa presiden Megawati, kebutuhan tenaga kerja terampil memang terbilang sangat tinggi. Oleh karena itu, pendidikan mesti menghasilkan tenaga kerja yang siap-pakai dan kompetitif. Penataran-penataran guru terjadi gelombang demi gelombang, tapi bukan penguasaan materi yang penting, melainkan melulu kehadiran formal. Berbagai *cash program* dilaksanakan sebagai cara cepat untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap. Dalam dunia pendidikan formal, kondisi dan cara berpikir itu melahirkan pola-pola bimbingan belajar, tidak untuk mematangkan kepribadian dan memperdalam pengetahuan, melainkan untuk membantu siswa agar meraih kelulusan secara instan. Sesungguhnya pada titik inilah formalisme secara pasti memasuki dunia pendidikan dan mulai membudaya. Tanda kelulusan dikejar, kewajiban administratif dipenuhi, tetapi tanpa penguasaan substansi dan proses kerja secara kualitatif. Formalisme itu

pada akhirnya mengondisikan berkembangnya mentalitas buruk di kalangan pendidikan, yaitu pengetahuan tanpa karakter, dan ilmu pengetahuan tanpa moralitas. Singkatnya, pendidikan tanpa integritas moral.

Kurikulum 1994 menurut hakikatnya menarik perhatian kepada kualitas pendidikan dengan menekankan substansi pengajaran. Intisarinya ialah penguasaan teori atau konsep sebagai dasar bagi aplikasi praktis. Logika ini bersumber dari paham kodrat manusia sebagai makhluk rasional. Hanya manusia yang berpikir dan mempertimbangkan tindakannya. Tindakan didahului oleh pengetahuan dan pengertian, praktik atau penerapan tidak mungkin tanpa konsep. Pola berpikir ini jelas sesuai dengan pragmatisme seperti yang dikembangkan oleh William James dan diterapkan dalam pembaharuan pendidikan pada zamannya. Setiap konsep atau teori mesti memiliki *practical cash value*. Namun *content-based learning* yang dianut kurikulum 1994 berbeda dari *concept-based learning*. *Content-based learning* menekankan bahan atau materi yang ditentukan sebagai apa yang harus diketahui. Isinya dibatasi pada fakta dan sejumlah data. Pendekatan ini mewajibkan murid menguasai informasi penting sejauh yang ditransfer oleh gurunya. Menghafal menjadi cara belajar yang dianggap sesuai. Hasil pendidikan dinilai menurut angka atau nilai kelulusan yang dicapai. Guru dan murid mempersiapkan ujian negara dengan daftar pertanyaan-pertanyaan dan lembaran jawaban yang dianggap sebagai kebenaran pasti. Apa yang dikatakan guru, itulah kebenaran. Di sini guru menjadi pusat dan pengukur keberhasilan. Meminjam perkataan Paolo Freire, guru-guru dalam praktek pendidikan semacam itu “lebih buruk daripada seorang otoriter yang koheren”.⁵ Itulah praktek otoriterisme dalam pendidikan. Pendekatannya pun terlampu positivistik. Dalam kenyataannya,

kurikulum 1994 mewarisi corak sentralistik (politik) Orde Baru. Seluruh substansi pengajaran diwajibkan dan dikontrol oleh pemerintah pusat melalui departemen pendidikan.

Concept-based learning tidak terikat pada substansi atau bahan ajar tertentu. Di sini peserta didik diberi ruang untuk berpikir kreatif melampaui pokok yang diajarkan atau didiskusikan. Konsep memang melampaui fakta dan melebihi batasan sosial-budaya, atau ruang dan waktu. Paham positivisme tidak cocok dalam *concept-based education*. Konsep bersifat terbuka, dan arena itu bercorak interdisipliner. Konsep atau pengertian “manusia”, misalnya, dapat dibicarakan dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, *concept-based education* membuka ruang bagi proses belajar yang bersifat multikultural. Di sini yang ditekankan bukan substansi atau ajaran tertentu, melainkan pengertian (*understanding*) secara dinamis. Karena dunia dan kehidupan terus berubah, maka pengertian atau konsep juga terus berkembang. Bangunan konsep mesti terus diperbarui secara kreatif. Kreativitas guru dan murid menjadi ciri khas *concept-based learning*. Dalam *content-based learning* guru mengharapkan muridnya untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang dikemukakan. Dalam *concept-based learning* jawaban bukanlah akhir, melainkan awal bagi pertanyaan yang baru. Guru perlu mengkondisikan muridnya untuk terus mengemukakan pertanyaan, karena bertanya berarti berpikir dan terus berpikir. Di sini jawaban terhadap suatu pertanyaan selalu bisa dilampaui. Pengetahuan yang dianggap baru akan segera menjadi tua dan diganti dengan kebaruan yang lain. Hasrat untuk mengemukakan pertanyaan semestinya menjadi salah satu indikasi kemajuan belajar. Atas cara itu *concept-based learning* memungkinkan peserta didik untuk

menjadi manusia pembelajar sepanjang hayatnya. Menurut hakikatnya, KTSP 2006 menganut *concept-based education*, walaupun dalam kenyataannya para pendidik masih harus bekerja keras untuk menjadi guru yang kreatif dan mampu berpikir secara konseptual. Tanpa kemampuan berpikir kreatif, secara aplikatif KTSP berubah menjadi *content-based learning*.

Kemendesakan kurikulum 2013 dilatarbelakangi oleh realitas sosial-politik penyelenggaraan negara yang nyaris kehilangan integritas moral. Selain pengalaman masyarakat sendiri, survei dan studi dari berbagai lembaga nasional dan internasional menunjukkan adanya kebangkrutan moral. Salah satu indikatornya ialah praktik korupsi yang sedemikian meluas dan mengakar dalam semua tingkat pemerintahan. Korupsi telah menjadi mentalitas atau cara berpikir dan bertindak, juga dalam dunia pendidikan. Itu tampak pada manipulasi administratif dan ketidak-jujuran akademik yang sedemikian massal dipraktekkan di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, melalui pendidikan nilai dan pembentukan karakter penyakit-penyakit sosial hendak dipulihkan dan mentalitas dibarui. Ruang kelas dan sekolah dilihat sebagai pusat kebudayaan yang baru, *locus* bagi proses-proses transformasi sosial. Gagasan pendidikan Paolo Freire muncul di sini: mengubah mentalitas dan realitas masyarakat melalui pendidikan dengan pedagogi hati. Pendidikan yang transformatif berakar pada kesadaran yang dalam, konsientisasi, kesadaran untuk ingin tahu, intensionalitas sebagai kesengajaan untuk sadar akan diri sendiri dan akan dunia, bertanya tentang makna tindakan bagi orang lain dan bagi lingkungan. Dengan kata lain, mentalitas dan kelaziman sosial mesti dipertanyakan. Itulah pendidikan kritis yang menyentuh sampai ke kedalaman kesadaran dan melampaui sekedar rasionalitas.

Pendidikan atau pembentukan karakter mengintegrasikan dimensi-dimensi kesadaran nilai, pengertian rasional dan tindakan konkret. Karakter yang kuat berakar pada nilai yang disadari dan diyakini. Watak yang mewujud dalam tindakan merupakan hasil pembiasaan di satu pihak dan di lain pihak hanya bisa stabil karena nilai yang dihasrati. Konsistensi perilaku dan stabilitas hidup tergantung pada karakter. Dalam dinamika hidup dan dunia yang terus berubah, hanya karakter yang bisa memampukan orang untuk bertahan dan berkanjang dalam menghadapi berbagai pergumulan. Maka pendidikan karakter membutuhkan dan mengandaikan pendidikan nilai dalam arti sebagai proses mengenal, mengerti dan menginginkan nilai-nilai pilihan. Pengetahuan tentang kejujuran dan keadilan tidak sendirinya menghasilkan tindakan jujur dan perbuatan yang adil. Kejujuran dan keadilan baru bisa menjadi watak jika nilai-nilai itu dimengerti dan dikehendaki. Thomas Lickona, seorang psikolog dan ahli pendidikan karakter Amerika Serikat, merancang bangunan pembentukan karakter sebagai berikut: perbuatan moral hanya mungkin karena pembiasaan, tapi pembiasaan bersumber pada kehendak, dan kehendak didahului oleh pengertian. Karakter yang baik berkembang melalui tiga tahap dasar: mengetahui apa yang baik (*knowing the good*), mencintai atau menginginkan apa yang baik (*desiring the good*) dan melakukan apa yang baik (*doing the good*). Ketiga-tiganya mesti menjadi pembiasaan: kebiasaan berpikir tentang apa yang baik dan positif, kebiasaan hati menghendaki apa yang baik, dan kebiasaan melakukan apa yang dipikirkan dan dikehendaki. Karakter melebihi sekedar pengetahuan kognitif, juga tidak identik dengan kompetensi dalam arti kemampuan kerja. Karakter mengartikulasi jati diri atau kualitas kepribadian sebagai manusia.

Dengan menjadikan pembentukan karakter sebagai arah pendidikan, kita memang kembali kepada struktur pemikiran Konfusius seperti dicatat dalam *Ta Hsueh (Pengajaran Agung)* – untuk menyebut yang paling tua. Menurutnya, perubahan sosial harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan memiliki keutamaan-keutamaan moral. Keutamaan berkembang melalui pendidikan dalam keluarga dengan mengikuti aturan-aturan tradisi dan ritual-ritual. Jadi, seperti diajarkan juga oleh Aristoteles, keutamaan merupakan hasil pembiasaan. Proses pembiasaan tersebut melibatkan aspek rasional sebagai unsur kognitif dan kehendak atau hasrat untuk bertindak sesuai pengertian.

Kurikulum sebagai pengejawantahan arah pendidikan bukanlah sekedar instrumen teknis. Penting sekali bagi para pendidik agar mampu mengidentifikasi filosofi yang mendasari suatu kurikulum. Kandungan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 menyatakan bahwa etika keutamaan telah menjadi visi filosofis bagi arah pendidikan nasional kontemporer. Ada masanya di mana kurikulum nasional didasarkan atas filsafat pendidikan pragmatisme dan konstruktivisme. Tetapi sekarang dalam kurikulum 2013 filosofi yang paling dominan ialah paham etika keutamaan.

4. ETIKA KEUTAMAAN

Kajian di atas menyiratkan bahwa arah pendidikan nasional Indonesia dewasa ini kembali kepada etika keutamaan – walaupun tetap dalam bingkai bahasa “kompetensi”. Pendidikan mesti menjadi proses mendewasakan peserta didik sampai menjadi manusia yang berkeutamaan, yaitu memiliki karakter-karakter mulia sebagai ciri khas kepribadiannya. Apapun keterampilannya dalam bekerja, ia harus berkeutamaan. Kecerdasan intelektual pun perlu

seimbang dengan keutamaan. Keutamaan menjadi karakteristik kecerdasan. Dengan kata lain, perkembangan terakhir kurikulum pendidikan Indonesia menjadikan manusia yang berkeutamaan sebagai indikator terwujudnya cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kurikulum 2013 secara eksplisit menyatakan pendidikan karakter sebagai sarasannya. Seperti telah dikatakan sebelumnya, struktur kurikulum ini membedakan empat kompetensi inti, yaitu kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan (kognitif), dan penerapan pengetahuan atau (keterampilan). Masing-masing kompetensi inti tersebut merujuk kepada sejumlah nilai yang disebut “nilai-nilai karakter bangsa”. Nilai yang berkaitan dengan sikap keagamaan: nilai religius, jujur, toleransi, tanggung jawab. Nilai yang berkaitan dengan sikap sosial: demokrasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, jujur, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai yang berkaitan dengan pengetahuan: jujur, disiplin, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca. Nilai yang berkaitan dengan keterampilan: disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab. Tampak bahwa suatu nilai dapat masuk dalam satu atau lebih kategori kompetensi inti. Dengan meletakkan nilai-nilai sebagai dasar setiap kompetensi inti, kurikulum 2013 secara eksplisit menunjukkan ciri khasnya, yaitu menganut *value-driven education* yang titik fokusnya terletak pada kualitas. Nilai berarti sesuatu yang benar, baik, luhur dan mulia, dan karena itu dijadikan sebagai ideal yang dicita-citakan atau diperjuangkan. Dalam pendidikan, tetapi juga dalam kegiatan bisnis atau lainnya, nilai yang diyakini memberi arah, menarik, memikat, dan karena itu menjadi sumber energi. Pendidikan yang berorientasi nilai atau yang berbasis

nilai-nilai cenderung lebih mengutamakan pembentukan watak daripada formalitas angka kelulusan atau ijazah. Oleh karena itu, pertanyaan pokoknya berbunyi: Manusia macam apa yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan? Inilah juga pertanyaan dasar etika keutamaan.

Ciri khas utama dari etika keutamaan ialah berpusat dan fokus pada manusia sebagai *moral agent*. Teori etika ini tidak bertanya, apakah *perbuatan* saya sesuai dengan norma atau tidak, atau apakah *perbuatan* saya tergolong jujur dan adil. Etika keutamaan juga tidak bertanya, apakah perbuatan saya sesuai dengan *kewajiban* yang mesti saya dilakukan, atau apa yang wajib saya lakukan? Pertanyaan pokok etika keutamaan ialah manusia macam apakah saya ini? Apakah saya seorang yang jujur dan adil? Jadi, etika keutamaan bukanlah *ethics of doing*, melainkan *ethics of being*. Ia tidak bertanya tentang “*what should I do*”, melainkan “*what should I be*”. Jika diterjemahkan ke dalam bingkai kurikulum 2013, maka masalahnya bukan sekedar pengetahuan ilmiah (kognitif) apa yang telah saya miliki, dan keterampilan apa yang telah saya kuasai, melainkan terutama pribadi manusia macam apa saya ini. Melalui proses pendidikan saya harus menjadi manusia macam apa, dengan watak atau karakter apa. Nilai-nilai yang disebutkan di atas berkaitan langsung dengan pokok masalah tersebut. Dengan demikian, melalui pendidikan karakter kurikulum 2013 mengarahkan proses belajar-mengajar agar peserta didik dapat berkembang menjadi manusia yang religius, jujur, toleran, disiplin, bertanggung jawab, bersahabat, dan seterusnya. Dalam arah pendidikan itu juga dibedakan dengan jelas antara pengetahuan ilmiah, keterampilan kerja, dan watak atau karakter. Perbedaan ini pun menjadi ciri khas teori etika keutamaan.

Teori etika keutamaan sudah dikembangkan secara sistematis oleh Aristoteles (384-322 sebelum Masehi). Apabila di zaman sekarang etika keutamaan secara luas menarik minat, maka teori Aristoteles yang pertama dirujuk. Filsafat Yunani pada umumnya dan Aristoteles pada khususnya menggunakan kata “*areté*” untuk menunjuk pada keutamaan (*virtue*). Orang yang berkeutamaan memiliki watak atau kepribadian dengan kecenderungan dasar untuk mampu berbuat baik secara moral. Keutamaan adalah kecenderungan dasar dan tetap atau disposisi yang menjadi ciri khas atau karakter seseorang sehingga ia *selalu* dapat memilih tindakan yang benar dan baik. Keutamaan memungkinkan seseorang untuk selama seluruh hidupnya secara konsisten berbuat baik, karena ia memiliki batin yang kuat, kehendak yang tidak mudah goyah, berani dan tanpa pamrih. Inilah ciri orang yang berkeutamaan, orang baik secara moral dan orang yang berbahagia.⁶ Menurut Aristoteles keutamaan memang merupakan watak atau karakter kepribadian orang yang bahagia, namun keutamaan tidak bercorak individualistis. Keutamaan selalu punya dimensi sosial atau komunitas, karena manusia menurut hakikatnya hidup dalam *polis*, makhluk yang hidup dalam masyarakat (*zoon politikon*). Kebahagiaan dan perbuatan etis yang baik merupakan buah dari bertindak sesuai keutamaan dalam relasi dengan orang lain. Kehidupan etis tidak terisolasi, melainkan merupakan unsur hakiki dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks itu setiap pemimpin mesti memiliki keutamaan. Sampai di sini kita melihat arah yang tepat dari paham karakter dalam kurikulum 2013. Di sana karakter sebagai watak kepribadian dan berbasis nilai-nilai dijadikan fondasi bagi pengetahuan kognitif dan penerapannya. Kecerdasan dan kecakapan kerja tidak bermakna secara fundamental tanpa keutamaan. Tanpa karakter segala pengetahuan dan

ilmu pengetahuan kehilangan signifikansi dan coraknya.

Kembali ke Aristoteles. Ia membuka buku II *Nicomachean Ethics* dengan membedakan dua jenis keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual meliputi baik kemampuan alamiah secara potensial maupun hasil pengembangan melalui pengajaran, oleh karena itu membutuhkan pengalaman dan waktu. Keutamaan moral berkembang melalui proses pembiasaan, dan tidak muncul secara kodrati. Aristoteles menjelaskan, batu yang menurut kodratnya jatuh ke bawah, tidak dapat dibiasakan untuk bergerak ke atas melawan kodratnya; atau, nyala api yang menurut kodratnya bergerak ke atas, tidak dapat dibiasakan untuk ke bawah. Tidak berarti bahwa keutamaan moral bertentangan dengan apa yang kodrati. Prinsip pembentukan keutamaan moral ialah “*learning by doing*”; untuk menjadi tukang bangunan yang baik, orang harus mengerjakan bangunan berulang kali. Jadi, agar menjadi orang yang adil, saya harus berulang kali dan terus menerus melakukan apa yang adil. Keutamaan moral dibentuk melalui pembiasaan. Menurut kodratnya saya dapat menjadi manusia dengan watak yang baik, tetapi untuk memiliki karakter yang baik itu, saya harus berlatih dan punya kebiasaan melakukan tindakan atau perbuatan yang baik. Konsep inilah yang dianut oleh pola pendidikan karakter menurut kurikulum 2013. Agar menjadi manusia religius dan memiliki karakter kejujuran, budaya sekolah perlu diciptakan untuk membiasakan anak mempraktikkan kehidupan religius dan memiliki disiplin agar selalu bisa berperilaku jujur. Karakter tidak dengan sendirinya berkembang melalui proses belajar-mengajar di kelas, melainkan melalui pembiasaan perilaku secara konsisten. Karena karakter adalah watak yang menjadi jati diri kepribadian, identitas merupakan hasil pembiasaan.

Keutamaan bukanlah suatu aktivitas atau tindakan, melainkan suatu *habitus*. Dalam konteks ini dapat dipahami pentingnya budaya sekolah yang positif untuk mengkondisikan berkembangnya integritas moral yang kuat.

Bagi Aristoteles keutamaan moral berarti keseimbangan atau harmoni antara dua kutub ekstrem, yang satu kelebihan (*excess*) dan yang lain kekurangan (*deficiency*).⁷ Selanjutnya, Aristoteles menguraikan berbagai keutamaan seperti keberanian, ughari, dan keadilan, yang semuanya merupakan jalan tengah antara dua kutub ekstrem. Seluruh buku V *Nichomachean Ethics* didedikasikan untuk membahas keadilan. Ia juga menguraikan tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan kekayaan atau segala sesuatu yang nilainya dapat diukur dengan uang (buku IV). Hal yang menarik ialah “persahabatan” diuraikan dengan panjang lebar dalam buku VIII-IX sebagai suatu keutamaan, atau paling kurang terkandung dalam keutamaan, yang sangat perlu dalam kehidupan manusia. Namun dari semua keutamaan yang disebut, keutamaan yang paling pokok ialah kebijaksanaan (*phronēsis*). Disebut keutamaan yang paling pokok atau keutamaan kunci, karena hanya orang bijaksana yang dapat menentukan standar jalan tengah yang tepat. Pernyataan terakhir ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Aristoteles membedakan keutamaan moral dari keutamaan intelektual. Yang pertama merupakan keutamaan dalam bertindak, sedangkan yang kedua adalah keutamaan dalam berpikir. Seperti telah dikatakan di atas, keutamaan moral merupakan pilihan jalan tengah, tapi kini perlu ditambahkan bahwa menurut Aristoteles, pilihan itu diperintahkan oleh pikiran dalam arti rasio.⁸ Rasio memiliki fungsi teoretis untuk mengenal kebenaran dan rasio praktis untuk memberikan petunjuk tentang tindakan praktis. Dua fungsi tersebut oleh

Aristoteles disebut kebijaksanaan teoretis (*sophia*) dan kebijaksanaan praktis (*phronēsis*). Dalam hubungan dengan keutamaan moral, kebijaksanaan praktis itulah yang berperan penting. Apa artinya kebijaksanaan praktis? Menjawab pertanyaan tersebut, baiklah dijelaskan perbedaan yang dibuat oleh Aristoteles tentang *epistēmē*, *sophia*, dan *phronēsis*.⁹ *Epistēmē* berarti pengetahuan, dan menunjuk pada kemampuan berpikir secara ilmiah. Pengetahuan dalam arti ini terkait dengan kerja intelek untuk mengerti suatu obyek, melakukan observasi dan kemudian menarik kesimpulan. *Epistēmē* berkaitan dengan menganalisis data empiris dan sekaligus dengan berpikir secara konseptual. Dalam arti itu, *epistēmē* sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki dimensi epistemologis, yaitu metode kerja dan logika penelitian yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang obyek tertentu. Tentu saja *epistēmē* dapat diajarkan. *Sophia* berbeda dari *epistēmē*. *Sophia* adalah kebijaksanaan teoretis, yaitu kemampuan manusia untuk mengontemplasikan kebenaran yang abadi atau realitas ilahi. Pada filsafat Plato, *sophia* merujuk kepada *idea-idea*, yaitu dunia yang tidak berubah-ubah, realitas sejati yang sebenarnya. Dengan *sophia* realitas inderawi dapat dipahami secara lebih tepat. *Sophia* memungkinkan orang menghadapi dunia sehari-hari dengan bijaksana. Hanya orang terpelajar yang dapat memiliki kebijaksanaan teoretis, yaitu melalui kebiasaan belajar dan berefleksi terus menerus. Itulah aktivitas berfilsafat dalam arti mencintai dan mencari kebijaksanaan (teoretis). Aristoteles menolak paham Plato. Menurutnya, *sophia* tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, karena alam ilahi tidak identik dengan *idea-idea*. *Idea* dan dunia inderawi membentuk satu kesatuan saja, yaitu substansi. Implikasinya, kebijaksanaan teoretis (*sophia*) merupakan satu hal,

sedangkan kebijaksanaan praktis (*phronēsis*) adalah hal yang lain. *Phronēsis* adalah kebijaksanaan dalam bertindak. Aristoteles menulis, kebijaksanaan praktis adalah “kebiasaan bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat dalam hubungan dengan apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia.”¹⁰ Tekanan di sini diberikan pada “kebiasaan”. Tidak seperti *epistēmē* yang dapat diajarkan dan *sophia* yang diperoleh melalui bernalar dan berkontemplasi, *phronēsis* diperoleh melalui kebiasaan dalam bertindak. Jadi, tentu kebijaksanaan praktis dapat dibentuk dengan belajar dari pengalaman, tetapi hal yang terpokok ialah proses pembiasaan dalam bertindak yang akan membentuk seseorang menjadi manusia utama karena memiliki kebijaksanaan praktis. Orang yang sudah memiliki *phronēsis* tahu bertindak secara tepat, benar, dan baik secara etis. Kesimpulannya, menurut Aristoteles, dalam kehidupan yang konkret, *phronēsis* lebih penting secara fundamental daripada *sophia* dan *epistēmē*.

Kurikulum 2013 menganut pembedaan yang dibuat Aristoteles – kendati dalam konteks yang sangat berbeda, bahwa karakter atau watak berbeda dari pengetahuan dan kepintaran. Orang yang memiliki banyak pengetahuan (*epistēmē*) dan punya kemampuan bernalar sangat tinggi (*sophia*), belum tentu bijaksana dalam bertindak (*phronēsis*). Berikutnya, penggalakan hidupnya budaya sekolah yang baik sebagai bagian dari tuntutan pelaksanaan kurikulum 2013, mengisyaratkan adanya kesadaran yang benar bahwa pembentukan karakter hanya bisa diwujudkan melalui pembiasaan. Budaya sekolah merupakan kondisi untuk membiasakan guru dan peserta didik berperilaku disiplin, jujur, adil, peduli sesama, ramah dan santun, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan seterusnya. Jadi, seperti dikatakan Aristoteles, keutamaan hanya bisa dicapai melalui pembiasaan.

5. PENUTUP

Arah pendidikan dasar dan menengah Indonesia kontemporer seperti yang tercermin pada kurikulum 2013 sebenarnya berada dalam arus kembalinya etika keutamaan dalam masa kini.¹¹ Etika keutamaan memberi tekanan dan fokus pada pembentukan manusia utama atau manusia berkeutamaan. Apa pun profesi atau jabatan seseorang, kualitas sikap dan tindakannya ditentukan oleh kebijaksanaan yang ia miliki. Cara berpikir dan berkomunikasi, cara kerja dan memimpin, cara mempertimbangkan dan memutuskan perkara, cara bersikap terhadap manusia dan alam, semuanya tergantung pada karakter dasarnya. Karakter menjadi perspektif atau paradigma bertindak, sama seperti dalam ajaran Aristoteles bahwa *phronēsis* menentukan kelakuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh iklim sosial-politik dan cara berpikir pemerintah yang berkuasa. Ada saatnya nilai-nilai ideologi negara sangat dominan, tapi kecakapan kerja pun pernah sedemikian tinggi disanjung dan dijadikan sasaran pendidikan nasional. Ada waktunya kompetensi kerja dituntut secara nasional dan sentralistik, namun kemudian otonomi dan kemajemukan diakui sebagai faktor penting dalam pendidikan. Arah kurikulum 2013 yang kini sedang diperjuangkan realisasinya menyuarakan kembali apa yang pernah ditulis oleh Shinichi Suzuki (1898-1998), “*Character first, ability second.*”¹² Karakter memberi corak bagi apapun kemampuan yang seseorang miliki. Oleh karena itu, pendidikan selalu harus berarti juga pendidikan karakter.

Keseriusan melaksanakan suatu kurikulum membutuhkan pemahaman secara komprehensif terhadap kompleksitasnya. Kelemahan yang sering kali

dijumpai ialah kurikulum dihadapi sekedar sebagai sarana teknis belaka. Implikasinya, konsep-konsep dasar atau filsafat yang memberi arah bagi kurikulum umumnya diabaikan atau paling tidak kurang dipahami oleh para pendidik. Padahal pada filsafat itulah terletak roh yang sebenarnya dari suatu kurikulum. Pengabaian seperti itu terulang dengan sendirinya jika pendidikan dan kurikulum pengajaran dipersepsikan sebagai instrumen politik atau bahkan sebagai sarana kontrol pemerintah. Bagaimanapun juga perlu diakui bahwa titik berangkat yang paling mantap dari transformasi sosiai-budaya ialah pendidikan, dan arah pendidikan ditentukan oleh filsafatnya. Oleh karena itu, etika keutamaan sebagai filsafat di balik kurikulum 2013 penting untuk dipahami oleh kalangan pendidikan Indonesia. Pemahaman ini sekaligus membuka jalan bagi kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai dan pendidikan moral. Sebagai konsep filosofis, teori etika keutamaan mengajarkan bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, membuatnya lebih beradab, memberikan pencerahan dan memberdayakan. Pendidikan tidak sekedar menyediakan tenaga yang siap untuk dipakai oleh industri, atau siap diserap oleh pasar.

Kandungan etika keutamaan sebagai filsafat dalam kurikulum 2013 tidak dengan sendirinya berarti bahwa konsep-konsep dasar pendidikan dalam kurikulum tersebut sudah komprehensif dan koheren. Tidak demikian. Tetapi pokok ini membutuhkan kajian tersendiri, dan tugas tersebut terletak di luar jangkauan artikel singkat ini.

CATATAN AKHIR

¹ Buku ini telah diindonesiakan: Kenneth A. Strike dan Jonas F. Soltis, *Etika Profesi Kependidikan*, terj. F. Sinaradi, cet. ke-3 (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2007).

² Selengkapnya, pasal 4 UU no. 2/1989 menyatakan, “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

³ J. Drost, *Dari KBK (Kurikulum Bertujuan Kompetensi) sampai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)* (Jakarta: Kompas, 2005).

⁴ Pendidikan karakter yang menjadi jiwa Kurikulum 2013 sesungguhnya merupakan perintah dari UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

⁵ Paolo Freire, *Pedagogi Hati*, terj. A. Widyamartaya (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.106.

⁶ Bdk. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, buku I, 10. Rujukan pada karya Aristoteles diambil dari: *The Complete Works of Aristotle*, edited by Jonathan Barnes, the revised Oxford translation, 2 volumes (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1985).

⁷ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, buku II, 8. Konteks Aristoteles ialah keutamaan dipahami sebagai pilihan, atau paling kurang melibatkan pilihan (buku II, 5), yaitu pilihan antara dua situasi ekstrem. Keutamaan selalu merupakan jalan tengah. Pokok ini dijelaskan dalam buku II, 6-7.

⁸ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, buku VI, 1. Pernyataan Aristoteles tersebut membuka penjelasan tentang keutamaan intelektual dalam seluruh buku VI.

⁹ Pokok-pokok ini dibahas dalam buku VI *Nicomachean Ethics: epistēmē* dalam buku VI, 3; *sophia* dalam buku VI, 7; dan *phronēsis* dalam buku VI, 5 dan 8.

¹⁰ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, buku VI, 5.

¹¹ Dalam konteks ini rujukan pertama-tama dapat diarahkan kepada studi Alasdair MacIntyre yang berjudul: *After Virtue: A Study in Moral Theory* (London: Duckworth, 1981). Selain itu dapat disebut pula sumber-sumber lain, antara lain: dalam etika kedokteran: E.D. Pellegrino and D.C. Thomasma, *The Virtues in Medical Practice* (Oxford: Oxford University Press, 1993); dalam etika bisnis: Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York: Free Press, 1995).

¹² Terkutip dalam: William Cooney, Charles Cross, and Barry Trunk, *From Plato to Piaget: The Greatest Educational Theories from Across the Centuries and Around the World* (New York: University Press of America, 1993).

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. *Nicomachean Ethics*, 1985. Dalam *The Complete Works of Aristotle*, edited by Jonathan Barnes, the revised Oxford translation, two volumes. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Cooney, William; Charles Cross; and Barry Trunk, 1993. *From Plato to Piaget: The Greatest Educational Theories from across the Centuries and around the World*. New York: University Press of America.
- Drost, J. *Dari KBK (Kurikulum Bertujuan Kompetensi) sampai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)*. 2005. Jakarta: Kompas.
- Freire, Paulo. *Pedagogi Hati*. 2001. Terjemahan A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Strike, Kenneth A. dan Jonas F. Soltis, 2007. *Etika Profesi Kependidikan*. Terjemahan F. Sinaradi, cetakan ke-3. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.